

BAB VI

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Sesuai tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini serta berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa :

1. Dari hasil penelitian mengenai Analisis Laporan Keuangan Pada Desa Oelnasi Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, diketahui bahwa dalam setiap tahapan proses pengelolaan keuangan desa yaitu terjadi musyawarah bersama dalam tahap perencanaan yang berkaitan dengan pembentukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) oleh bendahara.
2. Pada tahap pelaksanaan, SPP dilakukan setelah pengadaan barang/jasa. Pengajuan SPP pun tidak dilengkapi dengan buku kas pembantu kegiatan yang berfungsi untuk mencatat setiap transaksi penerimaan maupun pengeluaran yang terjadi di Desa Oelnasi.
3. Dalam penatausahaan pengelolaan keuangan desa di Desa Oelnasi, terdapat ketidaksesuaian pada tahap penatausahaan sebagaimana yang diatur dalam Permendagri No.113 Tahun 2014 Pasal 35 (ay) 2 yang menegaskan bendahara desa untuk mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran yang terjadi selama 1 tahun anggaran. Bendahara Desa Oelnasi tidak mencatat penerimaan Dana Desa sebagai bagian dari pendapatan transfer desa dalam buku kas umum. Selanjutnya Pada pasal 35 (ay) 4 Permendagri No.113

Tahun 2014 juga menjelaskan penyampaian laporan pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh bendahara desa kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya namun, Bendahara Desa Oelnasi menyampaikan laporan tersebut lebih dari tanggal yang telah ditetapkan.

4. Dalam tahap pelaporan keuangan desa di Desa Oelnasi, terjadi ketidakpatuhan Pemerintah Desa Oelnasi berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa, Kepala Desa harus menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes semester pertama paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun pada bulan Januari tahun berikutnya. Namun yang terjadi di Desa Oelnasi Kecamatan Kupang Tengah Kaupaten Kupang, Kepala Desa terlambat menyampaikan laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes semester pertama dan semester kedua, di mana kedua laporan tersebut disampaikan dalam waktu yang sama yaitu pada bulan Oktober Tahun 2018 (tahun anggaran berikutnya).
5. Dalam tahap pertanggungjawaban, Kepala Desa Oelnasi tidak melaporkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes kepada Bupati Kabupaten Kupang karena, Bendahara Desa Oelnasi tidak menyiapkan format Laporan Pertanggungjawaban realisasi APBDes dan format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa untuk dilampirkan bersama peraturan desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes sesuai ketentuan dalam Permendagri No.113 Tahun 2014. Selain itu, laporan pengelolaan

keuangan desa di Desa Oelnasi belum dapat di pertanggungjawabkan dengan baik karena, minimnya media-media yang digunakan sebagai sarana penyampaian informasi yang menyulitkan masyarakat untuk lebih mudah mengetahui Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa di Desa Oelnasi.

5.2 Saran

1. Diharapkan agar Pemerintah Desa Oelnasi memperhatikan setiap proses pembuatan laporan keuangan dengan baik sehingga tidak terjadi kesalahan prosedur pelaksanaan seperti pengajuan SPP yang dilaksanakan setelah pengadaan barang/jasa serta proses pencatatan seperti pencatatan buku kas umum yang tidak mencantumkan Dana Desa yang merupakan pendapatan transfer desa.
2. Pemerintah Desa Oelnasi khususnya penanggungjawab pembuat laporan keuangan dalam hal ini Bendahara Desa sebaiknya melaporkan pertanggungjawaban keuangan desa tepat pada tanggal yang telah ditetapkan sehingga terhindar dari sanksi yang berpengaruh pada kegiatan operasional desa.
3. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Pemerintahan Desa Oelnasi Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang lebih kompeten dan profesional, maka sebaiknya pemerintah Desa Oelnasi sering mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan desa yang diadakan oleh Kementrian Desa 1 (satu) kali setiap tahun anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirulah M. Adam, Ulum Ihyaul dan Prasetyo. 2016. *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014*. Jurnal Akuntansi Sektor Publik. Univerditas Muhammadiyah; Yogyakarta.
- Atmaja Aji. 2016. *Analisis Pengelolaan Keuangesan Dan Kekayaan Desa (Studi Kasus Di Desa Pelesungan Kecamatan Gondongrejo Kabupaten Karanganyer)*. Naskah Publikasi. Universitas Muhammadiyah; Surakarta.
- Bpkp. 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Carwaika. 2013. *Pelaksanaan Otonomi Desa Di Desa Bumi Rampak Kecamatan Kaibun Kabupaten Kutai Timur*. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Universitas Mulawarman.
- Data Keuangan Desa Oelnasi.2017.
- Dede Janjang Suyaman. 2016. *Manajemen Kewirausahaan Masyarakat Desa*. Alfabetha; Bandung.
- Dhesita dan Andini. 2015. *Analisis Yudiris Mekanisme Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng (Studikasuk Pada Desa Boreng, Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang)*. Skripsi; Universitas Jember.
- Dianasari R. Eka. 2016. *Analisis Kesiapan Desa dalam Implementasi Undang-Undang No. 6 Tentang Desa (Studi kasus pada Desa Petakan Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung Jawa Tengah)*. Artikel Peneliti. Universitas PGRI; Yogyakarta.
- Gea. 2004. *Integritas Personal Dan Kepemimpinan Etis*. Unifersitas BINUS; Jakarta.
- Hoesada. 2004. *Bunga Rampai Akuntansi Pemeritahan*. Penerbit Selempang Empat; Malang.
- Indrizal Edi. 2006. *Konsep Perdesaan dan Tipologi Desa di Indonesia*.Jurnal Antropologi FISIP. Universita Andalas; Padang.
- Jusup Haryono. 2012. *Dasar-dasar Akuntansi Jilid 1*.Penerbit STIE YKPN; Yogyakarta.

- Kementerian Keuangan Indonesia. 2018. *Buku Pintar Dana Desa*.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 2008. Edisi Keempat.
- Lake Getrudis .2016. *Evaluasi Penerapan Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Nimasi Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara*. Skripsi. Universitas Widya Mandira; Kupang.
- Mardiasmo.2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi; Yogyakarta.
- Moehar, Daniel Ir. 2003. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. PT. Bumi Angkasa; Jakarta.
- Murtiono. 2016. *Tata Kelola Keuangan Desa*. Modul. Invst; Yogyakarta.
- Poerwadarminta.2007. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. PN Balai Pustaka; Jakarta.
- Raga P. Yusran. 2017. *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 di Desa Sawu Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo*. Skripsi.Universitas Muhammadiyah; Kupang.
- Reksopoetranto.1992. *Manajemen Proyek Pembangunan*. Jurnal. Universitas Indonesia; Jakarta.
- Sanusi.2014.*Metodologi Penelitian Bisnis*. Cetakan ke 4. Selemba Empat; Jakarta.
- Sasongko.2013. *Implementasi Penatausahaan Dan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Perda No 16 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa Di Desa Mulawarman Kecamatan Tenggaraong Seberang Kabupaten Kuntal Kartanegara*. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Universitas Mulawarman.
- Sjafrizal.2014.*Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. PT Rajagrafindo Persada; Jakarta.
- Srirejeki.2015. *Tata Kelola Keuangan Desa*. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis. Universitas Jendral Soedirman.
- Subroto. 2009. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyon*. Universitas Diponegoro; Semarang.

Sujarweni.2015.*Akuntansi Desa* - Paduan Tatakelola Keuangan Desa. Pustaka Baru Press; Yogyakarta.

Thomas. 2013. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan* di Desa Sebwang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. Jurnal. Universitas Mulawarman.

Zahrah. 2011. *Pengaruh Integritas, Kompetensi, Dan Loyalitas Kepemimpinan Terhadap Kepercayaan Para Bawahan* Di Sbu Perkapalan Pt. Pusri Palmbang. Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis. Edisi Ke VI. Universitas Negeri Sriwijawa.

_____. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.

_____. Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

_____. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN.

_____. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

_____. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Peruhan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN.

_____. Peraturan Desa Oelnasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017.

_____. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.